

## BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

### 5.1 Simpulan

Kesimpulan umum dari penelitian ini adalah: *pertama* keterlibatan warga negara secara *online* oleh warga negara muda berkorelasi secara positif dengan partisipasi politik warga negara muda dalam partisipasi yang *offline*; *kedua* keterlibatan warga negara muda secara *online* meskipun secara eksplisit tidak bersifat politis, tetapi memiliki korelasi dengan keterlibatan politik yang lebih tinggi baik secara *online* maupun *offline*. Korelasi yang positif antara keterlibatan warga negara secara *online* dengan partisipasi politik warga negara muda menjadi jawaban terhadap pihak yang pesimistis terhadap keterlibatan warga negara secara *online* yang hanya dianggap sebagai “slactivism”, atau “aktivisme klik” karena mempromosikan ikatan yang lemah dan aktivisme beresiko rendah, menjadi tidak relevan lagi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan warga negara secara *online* khususnya melalui media sosial memiliki korelasi yang positif terhadap partisipasi politik secara *offline*.

Keterlibatan warga negara secara *online* melalui media sosial memang membutuhkan usaha yang sederhana oleh karenanya keterlibatan seperti ini disebut dengan “aktivisme mikro” (*micro activism*) maupun “keterlibatan tipis” (*thin engagement*). Meskipun bentuk keterlibatannya “tipis” maupun “micro” namun dengan segala kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan media sosial menjadikan sebuah wacana mendapatkan perhatian dalam skala yang luas oleh karenanya keterlibatan yang tipis ini dapat dimobilisasi untuk tujuan yang tepat. Hal ini juga membuktikan bahwa media sosial memiliki peranan yang sangat penting khususnya dalam keterlibatan warga secara *online* jika dilihat sebagai repertoar yang lebih luas dari momen evolusi *civic engagement*. Potensi media sosial dalam menjalankan peranannya memfasilitasi diskursus warga juga memberi harapan bahwa media sosial dapat membantu menghidupkan kembali potensi gerakan ekstra-parlementer. Dengan demikian, *online civic engagement* akan memperkuat akuntabilitas demokrasi khususnya di Indonesia.

Dengan demikian, *online civic engagement* telah terbukti menjadi sarana baru dalam menyampaikan aspirasi publik, kritik sosial, dan suara politik warga di era

kemajuan teknologi informasi. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana *Online civic engagement* juga memungkinkan siapa saja untuk bisa terlibat secara *online* karena minim risiko dan berbiaya rendah. *Online civic engagement* mempromosikan semacam “modal sosial digital” dengan mengembangkan keterampilan dan jejaring sosial yang pada gilirannya memfasilitasi keterlibatan sipil. Keterlibatan warga negara muda dalam isu-isu publik menjadi sarana bagi generasi muda untuk belajar dalam keterlibatan politik secara serius di level berikutnya, sehingga keterlibatan warga negara muda akan menumbuhkan budaya partisipatif khususnya bagi generasi muda yang sedang meniti menjadi warga negara yang aktif dan partisipatif.

Sedangkan kesimpulan khusus sebagaimana rumusan masalah yang diungkapkan adalah sebagai berikut:

1. Isu publik yang menjadi diskursus warga digital dalam keterlibatan warga negara secara *online* melalui media sosial Twitter pada tanggal 4 November 2021 - 5 Februari 2022 antara lain: 1) isu kekerasan seksual, 2) isu kepolisian, 3) isu vaksinasi, dan 4) isu kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) dengan jumlah keseluruhan data mencapai lebih dari 2,2 juta data. Dari keempat isu tersebut, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya isu IKN dengan jumlah data 359,9 ribu dipilih untuk selanjutnya dianalisis secara lebih dalam menggunakan teknik analisis pemodelan topik *Latent Dirichlet Allocation* (LDA). Setelah dilakukan tahapan proses LDA yang terdiri dari tiga tahap: *data preprocessing*, *data processing*, dan evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa isu IKN menjadi diskursus warga digital dalam empat topik: 1) *Topik 1* adalah warga digital yang membicarakan tentang sikap setuju terhadap pemindahan ibu kota negara; 2) *Topik 2* adalah topik yang membahas sikap tidak setuju terhadap isu pemindahan ibu kota negara; 3) *Topik 3* membahas tentang dukungan warga digital terhadap isu pemindahan ibu kota negara; sedangkan 4) *Topik 4* membahas tentang topik korupsi dan hukum.
2. Tipologi ideologi yang melatarbelakangi diskursus warga digital terhadap isu publik di ruang publik digital melalui media sosial Twitter antara lain adanya ideologi populisme yang membalut keterlibatan warga negara dalam isu IKN.

**Budi Mulyono, 2023**

**KETERLIBATAN WARGA NEGARA SECARA ONLINE DALAM ISU-ISU PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER UNTUK MEMPERKUAT KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN DIGITAL**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) diketahui bahwa dalam isu IKN tersemat ideologi *populisme nasionalis-sekuler* di satu sisi dan ideologi *populisme nasionalis-islami* di sisi lainnya. Dalam diskursus isu IKN, persaingan dalam memenangkan wacana di ruang publik digital terlihat nyata antara kelompok populisme nasionalis-sekuler dengan kelompok populisme nasionalis-islami disebabkan karena adanya peranan *buzzer* politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam perdebatan publik tentang IKN. Akibat perilaku para *buzzer* yang membabi buta dalam menangkak maupun mendistribusikan wacana di media sosial maka memunculkan gerakan populisme terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam wacana IKN.

3. Permasalahan yang dihadapi warga digital dalam keterlibatan warga negara secara *online* melalui media sosial Twitter dalam isu IKN diperoleh melalui tahapan analisis LDA dan CDA dan ditemukan setidaknya tiga permasalahan yaitu: 1) perbedaan perilaku yang ditunjukkan antara *online* dan *offline*; 2) tingkat keadaban warga digital yang buruk, dan 3) maraknya *buzzer* politik. Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut, kemudian peneliti menyusun kompetensi kewarganegaraan digital yang menunjang keterlibatan warga negara secara *online* dalam isu-isu publik melalui media sosial antara lain: *pertama* kompetensi identitas kewarganegaraan digital dan manajemen privasi (*digital citizenship identity and privacy management*) yaitu sebuah kemampuan untuk membangun serta mengelola identitas diri dan informasi pribadi yang dibagikan secara *online* untuk melindungi privasi diri sendiri dan orang lain dengan penuh tanggung jawab; *kedua* kompetensi etika, hak, dan tanggung jawab digital (*digital ethics, rights, and responsibilities*). Yaitu kemampuan menyangkut perilaku etis dalam berinteraksi secara *online* dengan orang lain, memahami hak-hak warga digital (hak privasi, akses dan inklusi, kebebasan berekspresi, serta keamanan) dan tanggung jawab warga digital (etika dan empati) dan memastikan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab bagi semua; *ketiga* kompetensi literasi media dan informasi (*media and information literacy*) yaitu kemampuan untuk

**Budi Mulyono, 2023**

**KETERLIBATAN WARGA NEGARA SECARA ONLINE DALAM ISU-ISU PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER UNTUK MEMPERKUAT KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN DIGITAL**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menafsirkan, memahami serta membedakan antara informasi yang benar dan salah, konten yang baik dan berbahaya, serta kontak *online* dapat dipercaya dan dipertanyakan, dan mengekspresikan kreativitas melalui media digital; *keempat* kompetensi akses dan inklusi (*access and Inclusion*), yaitu kemampuan untuk berperilaku terbuka untuk mendengar dan dengan hormat mengenali berbagai sudut pandang, dan terlibat dengan orang lain secara online dengan rasa hormat dan empati; dan *kelima* kompetensi partisipasi aktif dan keterlibatan warga (*active participation and civic engagement*) yaitu kemampuan dalam penggunaan media digital untuk berpartisipasi secara aktif maupun keterlibatan sipil secara efektif dan bertanggung jawab untuk memecahkan masalah bersama.

Kompetensi kewarganegaraan digital tersebut menjadi semacam panduan etika dan tanggung jawab warga digital ketika mencurahkan aktivitas kewarganegaraannya di dunia digital seperti di media sosial. Oleh karena itu, warga negara yang terlibat secara *online* menjadi memiliki panduan etika dan tanggung jawab warga digital sebelum melakukan aktivitas di ruang digital. Dengan kompetensi kewarganegaraan digital ini, setiap warga negara akan diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap setiap perilaku di dunia digital dan membatasi diri sesuai dengan kebutuhannya.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, pembahasan yang telah disusun terdapat sejumlah implikasi penelitian sebagai berikut

1. Media sosial telah memfasilitasi bentuk baru keterlibatan warga negara yang disebut *online civic engagement*. Bentuk baru *civic engagement* ini sejalan dengan optimisme terhadap penggunaan media sosial sebagai katalisator perubahan politik yang signifikan. *Online civic engagement* telah terbukti menjadi sarana baru dalam menyampaikan aspirasi publik, kritik sosial, dan suara politik warga di era kemajuan teknologi informasi. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana *online civic engagement* juga memungkinkan siapa saja untuk bisa terlibat secara *online* karena minim risiko dan berbiaya rendah.

Meskipun demikian bukan berarti tanpa kelemahan, *online civic engagement*

**Budi Mulyono, 2023**

**KETERLIBATAN WARGA NEGARA SECARA ONLINE DALAM ISU-ISU PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER UNTUK MEMPERKUAT KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN DIGITAL**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

juga menyiratkan euforia yang berlebihan terhadap aktivisme digital. Untuk menghindari bias keterlibatan, di masa depan dibutuhkan kajian yang lebih dalam dan komprehensif tentang konsep *online civic engagement* beserta tolok ukur yang mengukurnya tentang keterlibatan warga secara *online*.

2. Pada aspek teoritis maupun praksis penelitian ini telah berhasil merealisasikan salah satu *novelty*-nya yaitu pemanfaatan *big data* dan *machine learning* dalam pengambilan maupun pengolahan data untuk menjelaskan kewarganegaraan digital dan keterlibatan warga negara secara *online*. *Big data* menjadi salah satu alternatif metode penelitian untuk riset ilmu sosial dan menjadi sebuah penanda perubahan paradigma untuk memahami proses-proses sosial termasuk pendidikan kewarganegaraan dalam kajian kewarganegaraan digital maupun keterlibatan warga negara secara *online*. Pada era digital saat ini setiap individu adalah produsen data sehingga ketersediaan data sosial yang terekam secara digital semakin berlimpah. Dengan data yang berlimpah semua perilaku manusia seutuhnya bisa dibaca dan dianalisis dari perilakunya di ruang digital. Meskipun demikian, terdapat keterbatasan teknis dalam mengakses dan membaca *big data* oleh ahli sosial, untuk itu dibutuhkan kolaborasi dengan ahli teknologi informasi baik dalam hal pengembangan wawasan maupun kerja-kerja penelitian.
3. Secara teoritis tersusun kompetensi kewarganegaraan digital sebagai panduan dan indikator seseorang yang dianggap mampu dan siap menjadi warga digital yang bertanggungjawab, teratur, dan efektif khususnya dalam keterlibatan warga negara secara *online*. Kompetensi kewarganegaraan digital menjadi semacam panduan etika dan tanggung jawab warga digital ketika mencurahkan aktivitas kewarganegaraannya di dunia digital seperti di media sosial. Fokusnya adalah bagaimana membekali warga negara terhadap perilaku yang mungkin muncul akibat “ketidakterbatasan” dan “anonimitas” di dunia digital. Kemampuan penguasaan kompetensi kewarganegaraan digital menjadi indikator awal seseorang dianggap mampu dan siap menjadi warga digital yang bertanggung jawab, teratur, dan efektif. Karena dunia

**Budi Mulyono, 2023**

**KETERLIBATAN WARGA NEGARA SECARA ONLINE DALAM ISU-ISU PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER UNTUK MEMPERKUAT KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN DIGITAL**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

digital ibarat belantara yang sangat luas dan belum terlindungi oleh hukum sepenuhnya. Ketika aktivitas warga negara di dunia digital dibiarkan bebas yang terjadi selanjutnya adalah hukum rimba yang berlaku. Untuk itu, dibutuhkan panduan sebagai modal warga negara dalam melakukan aktivitas di dunia digital. Dengan kompetensi ini, setiap warga negara akan diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap setiap perilaku di dunia digital dan membatasi diri sesuai dengan kebutuhannya.

### 5.3 Rekomendasi

Berdasarkan pada kesimpulan penelitian dan implikasi yang dihasilkan, penulis merekomendasikan hal-hal berikut ini kepada pemerintah, lembaga pendidikan, dan para peneliti:

#### 1. Pemerintah

- a. Keterlibatan warga negara secara *online* terhadap isu-isu publik yang menjadi perhatian masyarakat menjadi sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan di era kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu dibutuhkan keterbukaan pemerintah dalam menerima kritikan maupun masukan khususnya dari warga digital dari setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.
- b. Digalakkannya pembelajaran tentang kompetensi kewarganegaraan digital ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi untuk merespons era teknologi informasi
- c. Kepindahan aktivitas warga negara dari ruang-ruang publik yang riil ke ruang digital tidak terelakkan lagi. Untuk itu dibutuhkan tidak hanya infrastruktur komunikasi dan informasi, tetapi juga kesiapan warga dalam menghadapi era tersebut.

#### 2. Lembaga Pendidikan

- a. Lembaga pendidikan baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi perlu mengintroduksi secara serius pengembangan pendidikan kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) khususnya pada pemahaman tentang kompetensi kewarganegaraan digital dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk merespons era

**Budi Mulyono, 2023**

*KETERLIBATAN WARGA NEGARA SECARA ONLINE DALAM ISU-ISU PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER UNTUK MEMPERKUAT KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN DIGITAL*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan semua orang berpindah aktivitasnya di ruang digital (*cyberspace*).

- b. Pemanfaatan *big data* dan *mechine learning* adalah masa depan kajian ilmu sosial, untuk itu diperlukan pengarusutamaan terhadap pemanfaatan *big data* dan *mechine learning* dalam berbagai riset ilmu sosial khususnya pendidikan kewarganegaraan. Pemanfaatan keduanya dalam kajian dan riset ilmu sosial menjadi salah satu penanda perubahan paradigma untuk memahami proses-proses sosial termasuk pendidikan kewarganegaraan dalam kajian kewarganegaraan digital maupun keterlibatan warga negara secara *online*.

### 3. Peneliti

Penelitian tentang keterlibatan warga negara secara online melalui media sosial ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan konseptual antara kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) dengan keterlibatan warga negara secara *online* (*online civic engagement*) sekaligus menyusun kompetensi kewarganegaraan digital yang menunjang keterlibatan warga secara *online* melalui media sosial. Penelitian ini menghasilkan serangkaian kompetensi kewarganegaraan digital yang disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh warga digital saat berinteraksi dan terlibat secara *online* di media sosial. Dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif untuk menguji efektivitas kompetensi kewarganegaraan digital yang telah disusun.

**Budi Mulyono, 2023**

*KETERLIBATAN WARGA NEGARA SECARA ONLINE DALAM ISU-ISU PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER UNTUK MEMPERKUAT KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN DIGITAL*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu